

## PENTINGNYA PENALARAN RASIONAL DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA YANG BERKUALITAS

**Brian Marwita Siti Tiara Maulia**

Program Studi Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas, Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Jambi

Email: [berianmarwita@gmail.com](mailto:berianmarwita@gmail.com) [sititiaramaulia@unja.ac.ad](mailto:sititiaramaulia@unja.ac.ad)

### **Abstrak**

Penalaran rasional memainkan peran penting dalam mewujudkan sistem demokrasi Pancasila yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini menyoroti pentingnya penalaran rasional dalam beberapa aspek kunci demokrasi Pancasila, termasuk partisipasi yang aktif, pencegahan manipulasi informasi, kepatuhan terhadap hukum, dialog yang konstruktif, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan menggunakan penalaran yang rasional, warga negara dapat lebih mudah mengambil keputusan yang terbuka, adil, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penalaran rasional dalam konteks demokrasi Pancasila, diharapkan dapat tercipta sistem demokrasi yang kuat dan berdaya tahan terhadap tantangan zaman. Demokrasi Pancasila, sebagai bentuk pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesetaraan, memerlukan kontribusi aktif dari setiap warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penalaran rasional menjadi landasan yang tak tergantikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sistem demokrasi Pancasila. Penulis berharap dengan adanya artikel ini para generasi muda mampu melihat peluang dan tantangan apa yang akan kita hadapi kedepannya dengan kemajuan teknologi yang kian harimakin maju.

**Kata kunci:** Demokrasi pancasila, rasional dalam pengambilan keputusan politik, partisipasi masyarakat berbasis penalaran rasional.

### **Abstrak**

Rational reasoning plays an important role in realizing an inclusive and sustainable Pancasila democratic system in Indonesia. This article highlights the importance of rational reasoning in several key aspects of Pancasila democracy, including active participation, preventing manipulation of information, compliance with the law, constructive dialogue, and maintaining national unity. By using rational reasoning, citizens can more easily make decisions that are open, fair and based on the principles of Pancasila. Through a deeper understanding of the role of rational reasoning in the context of Pancasila democracy, it is hoped that a democratic system that is strong and resilient to the challenges of the times can be created. Pancasila democracy, as a form of government that prioritizes the principles of justice, togetherness and equality, requires active contribution from every citizen in the decision-making process. In this context, rational reasoning is an irreplaceable basis for ensuring the success and desirability of the Pancasila democratic system. The author hopes that with this article the younger generation will be able to see what opportunities and challenges we will face in the future with increasingly advanced technological advances.

**Keywords:** Pancasila democracy, racism in political decision making, community-based participation in racial reasoning.

## PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila, sebagai fondasi sistem pemerintahan Indonesia, merupakan cerminan dari prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kesetaraan. Dalam mengimplementasikan demokrasi Pancasila, penalaran rasional menjadi landasan yang krusial dalam memastikan proses pengambilan keputusan yang adil, inklusif, dan berdasarkan pada kepentingan bersama. Penalaran rasional tidak hanya menyangkut kemampuan individu untuk memproses informasi secara obyektif, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi argumen-argumen dengan cermat, memahami implikasi keputusan politik, dan berkontribusi dalam membangun kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan dinamis, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penalaran rasional dalam mewujudkan demokrasi Pancasila menjadi semakin penting. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan menjelajahi peran krusial penalaran rasional dalam memperkuat dan melestarikan sistem demokrasi Pancasila, serta implikasi pentingnya dalam konteks sosial dan politik Indonesia saat ini.

Sistem demokrasi Pancasila adalah pondasi yang teguh bagi negara Indonesia, yang mengakar dalam prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan partisipasi aktif semua warga negara. Namun, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan demokrasi Pancasila, diperlukan lebih dari sekadar partisipasi politik yang sederhana; diperlukan juga kemampuan untuk berpikir secara rasional dan kritis. Dalam konteks ini, penalaran rasional menjadi salah satu elemen kunci yang tidak bisa diabaikan. Penalaran rasional membantu dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis fakta, logika, dan nilai-nilai moral yang mendasari Pancasila.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi pentingnya penalaran rasional dalam konteks mewujudkan sistem demokrasi Pancasila. Kami akan menyoroti bagaimana penalaran rasional memainkan peran krusial dalam memastikan partisipasi yang inklusif, menghindari manipulasi politik, menjaga integritas hukum, dan memperkuat persatuan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Dengan memahami betapa pentingnya penalaran rasional dalam proses demokrasi, kita dapat lebih mendalam dalam menghargai nilai-nilai demokrasi Pancasila dan memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam konteks sistem demokrasi Pancasila, penalaran rasional memiliki peran yang sangat penting. Sistem demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang berlandaskan pada sila-sila dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sistem ini mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan negara. Penalaran rasional, yang didasarkan pada logika, bukti, dan pemikiran kritis, adalah elemen penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penalaran rasional sangat penting dalam konteks ini:

1. **Pemilihan yang Berdasarkan Informasi yang Akurat:** Penalaran rasional membantu warga negara dalam memproses informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pemilihan yang berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh warga negara adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Penalaran rasional memungkinkan warga negara untuk mengevaluasi argumen, memahami konsekuensi keputusan, dan membuat pilihan yang rasional.

2. **Pemecahan Masalah yang Efektif:** Dalam sistem demokrasi, terdapat berbagai macam masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan secara efektif. Penalaran rasional membantu dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan mencari solusi yang paling rasional dan terukur. Proses ini melibatkan evaluasi berbagai opsi yang tersedia, mengevaluasi konsekuensinya, dan memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

3. Dialog dan Perdebatan yang Bermutu: Penalaran rasional memainkan peran penting dalam dialog dan perdebatan yang bermutu dalam sistem demokrasi. Dalam konteks Pancasila, dialog dan perdebatan yang konstruktif adalah sarana untuk mencapai mufakat dan mencapai keputusan yang terbaik. Penalaran rasional memungkinkan warga negara untuk mengemukakan argumen yang berdasarkan fakta dan logika, serta memberikan ruang bagi pemikiran kritis dan saling menghormati pendapat orang lain.
4. Pertanggungjawaban Publik yang Transparan: Penalaran rasional memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik dalam sistem demokrasi. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan, penalaran rasional memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dan bukan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini memperkuat integritas sistem demokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research, dimana dalam penelitian ini berdasarkan kepada studi kepustakaan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan yakni sekunder dan primer, selanjutnya data dikumpulkan dalam bentuk sebuah dokumentasi sehingga dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yang memberi tahu tentang bagaimana menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan terkait hukum dalam implementasi dekomposisi Pancasila (Dimiyati, 2004)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia telah mengalami kemerosotan moral dalam hal etika, empati, dan keadilan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menanamkan kembali nilai-nilai moral bangsa ini. Kemerosotan moral generasi muda khususnya anak sekolah dasar harus dihadapi dengan kekuatan yang lebih, di mana perlu ditanamkan nilai-nilai moral sedini mungkin (Nurgiyantoro, 2010). Degradasi moral yang diderita jika tidak ditangani secara khusus dan cepat akan membawa akibat yang berdampak sangat buruk bagi generasi mendatang. Pendidikan moral merupakan salah satu pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama yang menanamkan nilai-nilai moral pada anak.

Pada prinsipnya, pendidikan anak sangat bergantung pada manusia yang membentuk lingkungan yang mendukung. Anak dengan kondisi lingkungan yang baik pasti akan terkontaminasi hal-hal yang baik dan juga berkepribadian yang baik begitupun sebaliknya jika lingkungannya berisi hal-hal buruk maka anak juga akan terkontaminasi dengan hal buruk dan membentuk kepribadian yang buruk juga. Pengertian nilai menurut (Elmubarak, 2008) yaitu makna dan harga atau isi serta pesan, gairah dan antusiasme baik yang tersirat maupun tersurat, maka nilai bermakna sesuatu yang memiliki fungsi. Nilai difungsikan untuk membimbing dan mengendalikan perilaku seseorang, karena dengan nilai dapat dijadikan untuk standar dalam perilaku.

Dalam pendidikan nilai itu sendiri menurut merupakan unsur yang terkena atau tertuju dalam filosofi tujuan dari pendidikan itu sendiri, dimana tujuan dari pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, membentuk individu kamil, serta membangun jiwa yang paripurna atau manusia dengan seutuh – utuhnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan suatu kecenderungan yang mampu memengaruhi mentalitas serta perilaku seseorang, juga tujuan dari nilai untuk membangkitkan minat yang dapat disukai dan dihargai oleh orang lain. Nilai mempunyai sifat yang abstrak akan tetapi nilai dapat diukur dalam bentuk sikap juga perilaku di dalam kehidupan sehari - hari. (Narwanti, 2011) menyatakan sejalan dengan itu pendidikan nilai merupakan suatu proses kependidikan dalam pembelajaran yang memiliki tujuan bukan saja dalam ranah kognitif atau kecerdasan melainkan dalam sikap dan perilaku siswa seperti emosi secara psikologis, karena dengan pendidikan nilai merupakan membimbing dan mengendalikan seseorang dari yang kurang baik menjadi lebih baik, yang lupa di ingatkan, maka pendidikan nilai mampu meningkatkan semua aspek siswa baik itu otak, jiwa, juga kecerdasan emosional.

Di Indonesia Pendidikan terbagi menjadi tiga jalur utama, yaitu salah satunya pendidikan formal (Sekolah) merupakan Pendidikan yang didapatkan dari sekolah bukan saja tentang materi pelajaran, disekolah para siswa juga diajarkan tentang bagaimana mereka berperilaku saling menghormati, menyayangi dan menghargai serta memiliki perilaku yang baik terhadap sesama teman (Samrin, 2016). Dengan adanya pengaplikasian tentang berperilaku yaitu adanya saling menghormati, menyayangi, dan menghargai. Para guru berharap agar para siswa dijauhkan dari adanya tindak kekerasan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah.

Namun pada kenyataannya sering kali terjadi perilaku-perilaku menyimpang akhirakhir ini yaitu seperti minimnya sopan santun, minim etika, dan lebih parahnya menuju kepada tindakan bullying. (Pratomo, 2016) Apabila didasarkan pada kejadian diatas betul-betul ironis dan mengkhawatirkan. Inilah yang bisa disebut dengan krisis moral, dimana moral seakan dianggap tidak penting jika krisis moral terjadi apa yang bisa kita lakukan? tentu saja melalui pendidikan karakter karena pendidikan karakter sangat dibutuhkan membangun karakter bangsa yang kuat dalam menghadapi krisis moral yang sedang terjadi. Dalam hal ini PKn diharapkan bisa menjadi wadah untuk membangun karakter bangsa yang seiring mulai hilang. Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa didalam mengampil keputusan baik atau buruk, menjaga kebaikan tersebut serta mengaplikasikan kebaikan itu didalam kehidupan sehari hari dengan sepenuh raga dan hati(Ibda, 2012).

Pendidikan nilai harus dinternalisasikan dalam pendidikan karakter agar peserta didik mempunyai budi pekerti yang baik serta menjadi pribadi yang berkarakter dan kepribadian yang berwatak. Sehingga bisa ditarik konklusi bahwa masih ada keterkaitan antara pendidikan nilai & pendidikan karakter. Hal ini lantaran pendidikan nilai berjalan beriringan satu sama lain yaitu pendidikan nilai membentuk pendidikan karakter, dan pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai

(Muhammad, 2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa model dari Pendidikan Karakter itu sendiri yaitu:

1. Menggunakan metode pengajaran yang memfokuskan guru untuk mencari keunikan yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat diterapkannya aspek kecerdasan manusia.
2. Dapat menjadikan lingkungan belajar tersebut menjadi kondusif, hal ini diharapkan siswa dapat belajar secara efektif dan berada di dalam suasana yang aman, tanpa ancaman, serta dapat memberikan semangat.
3. Dapat menerapkan metode belajar yang aktif, kreatif, serta inovatif. Yaitu metode belajar yang dapat meningkatkan motivasi siswa agar esensi dari belajar itu sendiri dapat dirasakan oleh semua siswa, sehingga dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut.
4. Dapat memebrikan pembelajaran mengenai pendidikan karakter secara sistematis, akurat, dan berkesinambungan.

Terdapat dua istilah dalam pembelajaran kewarganegaraan, yaitu terdapat PKn yang merupakan singkatan dari Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan PKN memiliki kepanjangan yaitu Pendidikan Kewargaan Negara. Namun keduanya mempunyai makna dan arti yang berbeda. (Murtado & Dkk., 2021) menyebutkan bahwa Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) sangatlah dikenal dengan istilah civic yang memiliki arti bahwa PKN ini merupakan salah satu mata pelajaran yuang memiliki tujuan untuk membina serta membentuk warga negaranya yang baik serta paham betul mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan suatu Pendidikan yang berada di dalam status formal warga negara nya yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1949 tentang Status Warga negara.

Dalam Wiranataputra, 2021 menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang memiliki hubungan dengan konsep nilai, norma dan moral yang sudah terdapat di dalam Pancasila serta UUD 45 dan penjelasan lebih rinci terdapat pada sumber hukum yang ada di bawah UUD 45.(Fathurrohman, 2019) Untuk jenjang Sekolah Dasar terdapat beberapa konsep dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri yaitu terdiri dari nilai, moral, Pancasila dan UUD 45 secara memiliki jenjang yang berkelanjutan semakin luas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar. Secara umum PKn di Sd memiliki tujuan agar dapat mengembangkan kemampuan siswa Sekolah Dasar (1) agar lebih bisa untuk berpikir secara rasional, kreatif, dan kritis dalam memahami berbagai isu mengenai kewarganegaraan, (2)

berkembang secara positif dan demokratis agar dapat membentuk pribadi yang memiliki karakter-karakter yang lebih baik di masa yang akan datang, (3) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam forum dunia baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menggunakan pemanfaatan Iptek, (4) Berpartisipasi aktif dan cerdas dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut tentang kemasyarakatan, bernegara, berbangsa, dan pastinya anti korupsi (Puspita, 2014).

Moralitas adalah sistem nilai yang tertera tentang bagaimana seharusnya seseorang hidup dengan baik sebagai manusia. Moralitas terkandung dalam norma-norma kehidupan sosial berupa nasihat, petunjuk, aturan dan tata tertib yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui agama atau budaya tertentu serta Moralitas juga merupakan totalitas kualitas tindakan manusia yang terkait dengan kebaikan dan kejahatan. (Tanshil, 2012) mengemukakan bahwa pertumbuhan tingkat pertimbangan moral dipengaruhi oleh lingkungan moral di rumah, di sekolah, dan di masyarakat luas. Lingkungan rumah yaitu keluarga dan masyarakat berikut lingkungan sekolah yang merupakan bagian dari lingkungan sosial dapat mempengaruhi pertumbuhan moral. Faktor internal, pertumbuhan moral tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan intelektual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor gender. Strategi penanaman nilai moral di sekolah merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk meningkatkan penilaian moral siswa dan memaksimalkan kemampuan berpikir moralnya agar Siswa dapat mengukur apakah tindakan yang telah mereka lakukan baik atau buruk. di lingkungan sekolah pertumbuhan moral bisa dilakukan melalui pendidikan karakter dikarenakan Membentuk kecerdasan afektif yang mengarah pada karakter pribadi dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Banyak ahli memberikan pemahaman tentang pendidikan karakter. Salah satunya menurut (Alawi, 2019) pendidikan karakter adalah upaya sadar yang berguna untuk membantu seseorang dalam menjaga, menguasai nilai-nilai, dan berkarakter sikap yang mulia sesuai dengan itu.

Dengan demikian, pendidikan karakter memiliki misi yang sama dengan pendidikan moral atau pendidikan akhlak. Pendidikan moral merupakan pendekatan yang dianggap sebagai gerakan terpenting dalam pendidikan nilai yang komprehensif. Pendidikan moral ini mencakup pengetahuan, sikap, keyakinan, keterampilan penyelesaian perselisihan, dan perilaku yang baik, jujur, dan penuh kasih (kemudian disebut dengan istilah "moral"). (S., Udin, M. A., 2013) Tujuan utama pendidikan moral adalah untuk menciptakan manusia yang mandiri yang memahami nilai-nilai moral dan berkomitmen untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pendidikan moral memiliki beberapa unsur. Artinya, pengetahuan moral, penalaran moral, kasih sayang, minat pada kepentingan orang lain, dan kecenderungan moral Menurut (Sudrajat, 2011).

Pendidikan moral sangat penting diterapkan di sekolah dasar untuk melahirkan anak-anak yang bermoral. Pendidikan moral di sekolah dasar diperlukan mampu mengubah perilaku anak-anak untuk bertanggung jawab, saling menghormati dan menghadapi tantangan zaman yang berubah dengan cepat ketika mereka tumbuh dewasa. Disinilah titik penting nilai-nilai moral menjadi sarana perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan memiliki keunggulan dan kecerdasan di berbagai bidang. Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan mental, kecerdasan kinestetik, kecerdasan logika, kecerdasan musikal, linguistik dan kecerdasan khusus (Nurkholis, 2013).

Didalam (Kusumawati, 2017) Hubungan nilai, moral, dan sikap memanglah sudah menjadi hal yang lumrah adanya. Ketiganya sudah menyatu dalam super ego. Super ego ini merupakan sebuah kode yang dapat mengarahkan atau mengantar sehingga naluri seseorang dapat terdorong sehingga dapat melakukan perbuatan yang sejalan dengan kenyataan di dunia yang ada di sekitar. Jika seseorang dapat memiliki serta mengembangkan super ego yang baik maka sikap individu tersebut akan memiliki kecenderungan yang didasarkan oleh nilai dan aturan

moral sehingga dapat terciptanya pribadi yang memiliki perilaku yang bermoral. Dengan didasarkannya sikap. Hubungan nilai moral dengan kewarganegaraan merupakan sebuah hubungan yang positif serta relevan terpenting jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat menjadikan pondasi yang kuat dengan dalil fungsi dari Pendidikan teoritik, dinyatakan bahwa kewarganegaraan dapat dengan sendirinya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai moral itu sendiri (Meinarno & Mashoedi, 2013).

Dapat diberikan hipotesis jika pada saat ini sudah menjadi hal umum mengenai sasaran Pendidikan karakter merupakan seluruh warga negara namun jika dibicarakan secara khusus sudah pasti hanya kepada peserta didik di seluruh jenjang Pendidikan. Karena warga negara tersebutlah yang masih dapat dikatakan sebagai warga negara yang belum jadi, maka dari itu mereka masih harus diberikan didikan atau bimbingan agar dapat menjadi warga negara yang dewasa atau yang sudah paham mengenai hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Jika diharuskannya penanaman Pendidikan karakter ini melalui Pendidikan Kewarganegaraan maka dapat dikatakan bahwa di dalam Pendidikan Kewarganegaraan ini terdapat nilai karakter utama dan nilai karakter pokok (Juliardi, 2015). Nilai karakter utama ini untuk bertanggung jawab, mandiri, kritis, logis, inovatif, kreatif, nasionalis, selalu menghargai beragam keberagaman, selalu sadar akan hak dan kewajiban setiap warga negara, dan masih banyak lagi nilai-nilai utama dari PKn ini yang lebih diperdalam ataupun diperluas agar semakin dapat diperkokoh fungsi dari PKn sebagai Pendidikan karakter itu sendiri. Sedangkan nilai karakter pokok dari PKn yaitu agar terciptanya peserta didik yang memiliki sikap jujur, religious, Tangguh, cerdas, peduli, dan demokratis.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks sistem demokrasi Pancasila, penalaran rasional memiliki peran yang sangat penting dan krusial. Penalaran rasional memastikan pemilihan yang berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Dalam konteks demokrasi, keputusan yang diambil oleh warga negara harus didasarkan pada penalaran yang baik, dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan argumen yang relevan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem demokrasi Pancasila. Dialog dan perdebatan yang bermutu menjadi mungkin berkat penalaran rasional. Dalam sistem demokrasi, dialog dan perdebatan merupakan sarana untuk mencapai mufakat dan keputusan yang terbaik. Penalaran rasional memungkinkan warga negara untuk mengemukakan argumen yang berdasarkan pada fakta dan logika, serta memberikan ruang bagi pemikiran kritis dan saling menghormati pendapat orang lain. penalaran rasional merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem demokrasi Pancasila yang berkualitas. Dengan menggunakan penalaran rasional, warga negara dapat membuat pilihan yang berdasarkan pada informasi yang akurat, memecahkan masalah dengan efektif, berpartisipasi dalam dialog dan perdebatan yang bermutu, serta mendorong pertanggungjawaban publik yang transparan. Dengan demikian, penalaran rasional menjadi komponen vital dalam membangun sistem demokrasi yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. Fajar. (2015). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(1).
- Agus, A. A. (2015). Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Moral Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, Dan Pengajarannya*, 10(1), 36–41.
- Alawi, A. H. I. (2019). Pendidikan Penguatan Karakter Melalui Pembiasaan Akhlak Mulia (Studi SD IT Asy Syifa Kota Bandung). *Jurnal Qiro'ah*, 9(1), 17–29.
- Edi Widiyanto. (2015). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Keluarga. *PG-PAUD Trunojoyo*, 2(1), 31–39.
- Elmubarak, Z. (2008). Membumikan Pendidikan Nilai. Alfabeta.
- Fathurrohman, F. (2019). Implementasi Pendidikan Moral Di Sekolah Dasar. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 3(1), 79–86. <https://doi.org/10.21067/Jbpd.V3i1.2929>
- Ibda, F. (2012). Pendidikan Moral Anak Melalui. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, XII(2), 338–347.
- Juliardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.22219/Jch.V1i1.10457>
- Kusumawati, Y. (2017). Urgensi Nilai Dan Moral Sebagai Subteori Pembelajaran Pkn DI SD. EL-Muhbib: *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 1(2), 54–63. <https://doi.org/10.52266/ElMuhbib.V1i2.150>
- Meinarno, E. A., & Mashoedi, S. F. (2013). Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 12–22.
- Muhammad, A. R. (2017). Lingkungan Pendidikan Dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 112–119. <https://doi.org/10.1177/002218568402600108>
- Murtado, M., & Dkk. (2021). *Kajian Pembelajaran Pkn MI / SD. Kajian Pembelajaran Pkn MI*, 1–121.
- Narwanti, S. (2011). *Pendidikan Karakter. Familia*.
- Nurdiyantoro, B. (2010). *Teori Pengkajian Fiksi. Universitas Gadjah Mada Press*.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto. 1(1), 24– 44.
- Pratomo, W. (2016). Memahami Pendekatan Dan Habitiasi Pkn Sebagai Pendidikan Nilai Dan Moral Bagi Guru Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Ke SD An*, 2(2), 1–8.
- Puspita, D. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengembangkan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 58–68. Ruslan,